



# RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2020

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALTARA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dan dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. RKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan kepala daerah setelah RKPD Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 27 bahwa kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai sebuah dokumen resmi SKPD. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 232 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 24 bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi membantu mewujudkan visi misi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan fungsi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan, dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya masalah penganggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai terjemahan dari Pasal 150 s/d Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, nampaknya berusaha menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kaitan dengan anggaran daerah, Peraturan Pemerintah ini telah meyiratkan adanya arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada publik. Hal ini sangat jelas tercantum pada 4 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa Anggaran Daerah disusun berdasarkan anggaran kinerja. Selanjutnya pada ayat (2) Pasal 19 dimaksud, menyatakan bahwa guna menunjang penyiapan anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pemerintah Daerah mengembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.

Rancangan Perubahan Renja merupakan pedoman perencanaan SKPD selama sisa periode tahun anggaran berjalan yang memuat rancangan kebijakan, program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran indikatif kegiatan secara rinci. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 Ayat 2 bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan RKPD serta evaluasi dari setiap kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan, Penyusunan Rancangan Perubahan Renja dimaksud agar pelaksanaan kegiatan yang belum dan akan dilaksanakan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan di dalam dokumen rencana tahunan SKPD. Keterkaitan Renja dengan Renstra serta dengan dokumen lainnya dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1 Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diterangkan bahwa proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, dan penetapan renja SKPD. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD merupakan tahapan yang dilakukan setelah dilaksanakan evaluasi selama tahun anggaran berjalan dan disesuaikan dengan perubahan keadaan dan target yang akan dicapai pada sisa tahun anggaran berjalan yang akan disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rancangan Perubahan Renja mengacu kepada beberapa produk perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 68);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2021 Provinsi Kalimantan Utara Tahun (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 56);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Perubahan Renja BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/kegiatan DPK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 pada sisa tahun anggaran berjalan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renja DPK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi Renja SKPD selama tahun anggaran yang telah berjalan (triwulan II (dua)
- b. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraantugas dan fungsi SKPD pada tw II (dua) dan akan menjadi landasan untuk penetapan kebijakan pada sisa tahun anggaran berjalan.
- c. Tersusunnya dokumen perubahan perencanaan Renja SKPD pada tahun 2020.
- d. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

### 1.4 Sistematika Penulisan Rancanga Perubahan Renja

Rancangan Perubahan Renja DPK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 ini disusun berdasarkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (DUA)**

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**



Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program dan kegiatan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2020**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara secara umum berisi tujuan dan sasaran serta cara mencapai target yang ditetapkan dengan menggunakan strategi yang tepat. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini disusun secara sistematis, jelas dan terukur dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan waktu yang akan dipergunakan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari suatu perencanaan yang baik yang bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian tersebut hanya dapat diperoleh melalui suatu evaluasi pelaksanaan program kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi perangkat daerah.

Dalam perjalanannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dinas lain pada umumnya telah mengikuti peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional, sehingga anggaran murni pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah mengalami dua kali penyesuaian APBD dari anggaran seharusnya Rp. 5.094.002.426 dilakukan rasionalisasi sebesar Rp. 1.786.224.442 menjadi Rp. 3.307.777.984 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Realisasi keuangan anggaran murni rasionalisasi Tahun Anggara 2020 sampai dengan Triwulan II (dua) sebesar 19.62% dan fisik 31.04%.

TABEL 2.1 REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG										
BERDASARKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA										
TAHUN ANGGARAN 2020										
30 Juni 2020										
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (RP)	PPTK
				FISIK		KEUANGAN				
				FISIK (%)	TTB (%)	KEUANGAN	(RP)	KEU (%)	TTB (%)	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6,379,444,271.00	100.00	31.80	40.16	1,650,679,425.00		25.87	25.87	4,728,764,846.00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,071,666,290.00	48.15	49.98	24.07	1,001,793,345.00		32.61	15.70	2,069,872,945.00
	BELANJA LANGSUNG	3,307,777,981.00	51.85	31.04	16.09	648,886,080.00		19.62	10.17	2,658,891,901.00
2.17 . 2.17.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,015,693,704.00	31.60	37.57	11.87	522,094,503.00		25.90	8.18	1,493,599,201.00
2.17 . 2.17.01. 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	0.08	4.79	0.00	239,500.00		4.79	0.00	4,760,500.00
2.17 . 2.17.01. 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	193,036,000.00	3.03	27.11	0.82	49,584,000.00		25.69	0.78	143,452,000.00
2.17 . 2.17.01. 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15,000,000.00	0.24	-	-	-		-	-	15,000,000.00
2.17 . 2.17.01. 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	831,416,000.00	13.03	27.36	3.57	228,515,940.00		27.49	3.58	602,900,060.00
2.17 . 2.17.01. 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	74,384,000.00	1.17	63.43	0.74	40,362,100.00		54.26	0.63	34,021,900.00
2.17 . 2.17.01. 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	150,968,426.00	2.37	100.00	2.37	-		-	-	150,968,426.00
2.17 . 2.17.01. 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29,219,278.00	0.46	-	-	-		-	-	29,219,278.00
2.17 . 2.17.01. 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000.00	0.16	-	-	-		-	-	10,000,000.00
2.17 . 2.17.01. 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	27,670,000.00	0.43	-	-	-		-	-	27,670,000.00
2.17 . 2.17.01. 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	4,000,000.00	0.06	100.00	0.06	-		-	-	4,000,000.00
2.17 . 2.17.01. 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	45,000,000.00	0.71	32.63	0.23	11,835,000.00		26.30	0.19	33,165,000.00
2.17 . 2.17.01. 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300,000,000.00	4.70	41.01	1.93	123,018,009.00		41.01	1.93	176,981,991.00
2.17 . 2.17.01. 01.19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	330,000,000.00	5.17	41.65	2.15	68,539,954.00		20.77	1.07	261,460,046.00
2.17 . 2.17.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	325,000,000.00	5.09	39.41	2.01	34,986,900.00		10.77	0.55	290,013,100.00
2.17 . 2.17.01. 02.11	Penyewaan Rumah/Gedung/ Gudang Parkiran Kantor Dinas	160,000,000.00	2.51	49.98	1.25	-		-	-	160,000,000.00
2.17 . 2.17.01. 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	140,000,000.00	2.19	32.53	0.71	34,686,900.00		24.78	0.54	105,313,100.00
2.17 . 2.17.01. 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25,000,000.00	0.39	10.20	0.04	300,000.00		1.20	0.00	24,700,000.00
2.17 . 2.17.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0.00	-	-	-	-		-	-	-
2.17 . 2.17.01 . 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	0.00	-	-	-	-		-	-	SYAHRAINI, SE
2.17 . 2.17.01. 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	705,330,000.00	11.06	9.21	1.02	15,538,000.00		2.20	0.24	689,792,000.00
2.17 . 2.17.01. 15.01	Penyediaan Bahan Bacaan Perpustakaan	524,230,000.00	8.22	8.93	0.73	-		-	-	524,230,000.00
2.17 . 2.17.01. 15.02	Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara	86,100,000.00	1.35	21.11	0.28	15,538,000.00		18.05	0.24	70,562,000.00
2.17 . 2.17.01. 15.03	Pembinaan pada Perpustakaan umum, khusus, sekolah dan perpustakaan ma	95,000,000.00	1.49	-	-	-		-	-	95,000,000.00
2.17 . 2.17.01. 15.08	Pengembangan Perpustakaan Digital	0.00	-	-	-	-		-	-	-
2.17 . 2.17.01. 15. 12	Bimbingan teknis perpustakaan berbasis IT	0.00	-	-	-	-		-	-	AJI FIKA TRISNAWATY, S.Sos
2.18 . 2.17.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	53,728,277.00	0.84	40.07	0.34	21,528,277.00		40.07	0.34	32,200,000.00
2.18 . 2.17.01. 16.03	Penduplikasian dokumen/arsip daerah	53,728,277.00	0.84	40.07	0.34	21,528,277.00		40.07	0.34	32,200,000.00
2.18 . 2.17.01. 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	208,026,000.00	3.26	26.31	0.86	54,738,400.00		26.31	0.86	153,287,600.00
2.18 . 2.17.01. 18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	43,550,000.00	0.68	-	-	-		-	-	VINI SUKANDRA, S. STP
2.18 . 2.17.01. 18.07	Workshop perpustakaan dan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/sw	164,476,000.00	2.58	33.28	0.86	54,738,400.00		33.28	0.86	109,737,600.00
	JUMLAH .....	6,379,444,271.00	100.00	31.80	40.16	1,650,679,425.00		25.87	25.87	4,728,764,846.00

Dalam realisasi renja, pengukuran dan evaluasi indikator kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, sehingga diperoleh nilai capaian kinerja outcome (hasil) sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%)	
				I		II									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.
3	4	7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	50%	2,015,693,704.00		249,465,150		284,052,677		533,517,827		26.47		5,198,212,334		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang di kirim	1,000	5,000,000	-	-	5	239,500	5	239,500	0.50	4.79	539	15,158,550	29.94	37.90
Penyediaan Jasa kmunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran satu tahun	12	193,036,000	3	24,792,000	3	24,792,000	6	49,584,000	50.00	25.69	42	257,573,361	70.00	44.41
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	5	15,000,000	-	-	5	-	5	0	100.00	-	10	3,802,000	58.82	19.01
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi dinas perpustakaan dan kearpian yang mendapat honorarium	12	831,416,000	3	114,257,970	3	114,257,970	6	228,515,940	50.00	27.49	42	1,185,947,626	70.00	48.83
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat kebersihan kantor yang tersedia	10	74,384,000	-	20,181,050	10	20,181,050	10	40,362,100	100.00	54.26	29	139,035,380	58.00	57.93
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	10	150,968,426	-	-	10	-	10	0	100.00	-	37	333,333,845	74.00	43.86
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan berkas yang digandakan	10	29,219,278	-	-	-	-	-	0	-	-	25	92,010,100	50.00	38.34
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	5	10,000,000	-	-	-	-	-	0	-	-	26	24,224,000	52.00	20.19
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10	27,670,000	-	-	-	-	-	0	-	-	21	599,120,380	42.00	127.47
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	10	4,000,000	-	-	-	-	-	0	-	-	25	37,417,300	50.00	46.77
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1,640	45,000,000	100	5,000,000	200	6,835,000	300	11,835,000	18.29	26.30	4,440	313,536,100	54.15	51.50
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat/Perjalanan Dinas yang dilaksanakan/diikuti dalam Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah	60	300,000,000	6	73,810,805	4	49,207,203	10	123,018,008	16.67	41.01	204	1,274,086,646	68.00	53.09
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah Rapat/Perjalanan Dinas yang dilaksanakan/diikuti dalam Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60	330,000,000	5	11,423,325	25	68,539,954	30	79,963,279	50.00	24.23	190	922,967,046	47.50	57.69
Rata-rata capaian kinerja (%)										53.94	29.11			51.74	46.21
Predikat kinerja															

<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>50%</b>	<b>325,000,000</b>		<b>-</b>		<b>34,986,900</b>		<b>34,986,900</b>				<b>164,696,915</b>		
Penyewaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang disewa	1	160,000,000	1	-	-	-	1	-	100.00	-	3	196,680,000	75.00	24.59
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat	4	140,000,000	-	-	4	34,686,900	4	34,686,900	100.00	24.78	18	138,950,415	94.74	173.69
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat	10	25,000,000	-	-	1	300,000	1	300,000	10.00	1.20	23	25,746,500	46.00	28.61
Rata-rata capaian kinerja (%)										70.00	12.99			53.93	56.72
Predikat kinerja															
<b>Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur</b>	<b>Presentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>60%</b>	<b>-</b>				<b>-</b>		<b>-</b>				<b>184,103,595</b>		
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	184,103,595	41.67	57.53
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	-			41.67	57.53
Predikat kinerja															
<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Presentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan</b>		<b>705,330,000</b>		<b>-</b>		<b>15,538,000</b>		<b>15,538,000</b>				<b>694,306,458</b>		
Penyediaan Bahan Bacaan Perpustakaan	Jumlah Eksemplar yang diadakan	60,000	524,230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	229	243,039,900	59.02	46.74
Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara	Jumlah peserta rakor	48	86,100,000	-	-	-	15,538,000	-	15,538,000	-	18.05	229	258,577,900	59.02	49.73
Pembinaan pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan masyarakat yang dibina	8	95,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	34	154,188,658	85.00	48.18
Pengembangan perpustakaan digital	Jumlah aplikasi perpustakaan digital yang dikelola	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38,500,000	50.00	8.56
Bimbingan Teknis Perpustakaan Berbasis IT	Jumlah Perpustakaan yang mengikuti bimbingan teknis	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	33.33	-
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	18.05			95.46	51.07
Predikat kinerja															
<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan</b>	<b>20%</b>	<b>53,728,277</b>				<b>21,528,277</b>		<b>21,528,277</b>				<b>58,471,277</b>		
Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Dokumen/Arsip yang diduplikasi	50	53,728,277	-	-	-	21,528,277	-	21,528,277	-	40.07	65	58,471,277	32.50	41.77
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	40.07			10.83	13.92
Predikat kinerja														R	ST
<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>	<b>Persentase tingkat kepuasan pengguna informasi</b>	<b>20%</b>	<b>208,026,000</b>				<b>57,976,000</b>		<b>57,976,000</b>				<b>204,454,260</b>		
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah peserta sosialisasi	50	43,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	73,239,130	43.48	16.28
Workshop perpustakaan dan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah peserta workshop	50	164,476,000	-	-	-	57,976,000	-	57,976,000	-	35.25	100	131,215,130	43.48	29.16
Rata-rata capaian kinerja (%)										-	35.25			86.96	45.43
Predikat kinerja															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			3,307,777,981.00						663,547,004						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)										61.97	27.09			56.77	45.15
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)															

## **2.2 Analisis Gambaran Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2020 memiliki 6 Program dan 25 Kegiatan. Dari Tabel 2.1 Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dan Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat bahwa beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan baik dari sisi keuangan dan kinerja (outcome) sehingga kualitas renjanya tidak dapat dihitung secara sistematis. Beberapa kegiatan tersebut adalah:

- 1) Program Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - f. Penyediaan peralatan rumah tangga
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 3) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
  - a. Penyediaan Bahan Bacaan Perpustakaan
  - b. Pengembangan perpustakaan digital
  - c. Bimbingan Teknis Perpustakaan Berbasis IT
- 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
  - a. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
  - b. Workshop Perpustakaan dan Kearsipan

Belum maksimalnya kegiatan-kegiatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu;

- a. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang berawal di bulan Maret Tahun 2020 yang berdampak pada ditunda bahkan dibatalkannya kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang
- b. Narasumber dan Fasilitator yang berasal dari daerah terdampak menyebabkan dibatalkan jadwal kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada Triwulan I dan II
- c. Sumber Daya Manusia yang belum memadai, mengakibatkan kegiatan berjalan menjadi kurang efektif
- d. Gedung Layanan perpustakaan yang belum selesai dalam administrasinya sehingga saat ini layanan perpustakaan dan kearsipan terkendala.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka diperlukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

- Menuntaskan penyelesaian pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan yang dianggarkan menggunakan DAK pada Tahun 2019
- Mengatur kembali jadwal kegiatan terutama kegiatan yang mengumpulkan orang banyak agar dilaksanakan menggunakan layanan daring terutama pada kegiatan Workshop Perpustakaan dan Kearsipan dan Rapat Koordinasi se-Kalimantan Utara
- Menyusun kembali kegiatan-kegiatan prioritas yang wajib didahulukan seperti pada
- Menekankan kepada PPTK Kegiatan agar memaksimalkan kinerja dan waktu dalam pengerjaan kegiatan dan SPJ sesuai dengan anggaran kas yang disetujui pada hasil rapat asistensi anggaran murni

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas tentu sangat dipengaruhi dengan beberapa faktor seperti contoh sarana prasarana. Sehubungan dengan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bersumber dengan DAK Tahun 2019, Perpustakaan Nasional telah menyurati daerah terkait dengan Nomor

3820/2/PRC.04.00/VI.2020 Tentang Optimalisasi Penggunaan Gedung Layanan Perpustakaan atas Pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah TA 2019 untuk segera menempati dan difungsikan gedung tersebut. Isu ini menjadi penting disebabkan pembangunan gedung tersebut sampai saat ini masih menyisakan anggaran DAK sebesar Rp 5.635.755.663. Sisa anggaran tersebut terjadi akibat adanya perpanjangan kontrak pengerjaan selama 90 hari pada tahun 2020. Gedung layanan ini juga perlu didukung dengan APBD dalam pembangunan interior dan belanja modal *landscape* (Jalan Menuju Gedung, Lahan Parkir, Drainase dan Pagar)

Sedangkan pada sisi kearsipan, nilai Tindak Lanjut Pengawasan Kearsipan (TLHP) pada tahun 2020 berada pada posisi paling bawah dibandingkan dengan provinsi lainya se-Indonesia. Ketiadaan peraturan-peraturan seperti Perda dan Pergub yang mendukung fungsi kearsipan menjadi nilai pengurangan paling besar. Dengan terbitnya Peraturan Daerah No.7 tentang Penyelenggaraan Kearsipan tahun 2019 menjadi batu loncatan lain untuk mendukung terbitnya peraturan lain seperti Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan unit kearsipan lainnya.



### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada usulan APBD-P Tahun 2020 ini, DPK melakukan penyesuaian anggaran pada kegiatan dinas yang dirasa perlu ditangguhkan akibat pandemi yang berkepanjangan. Beberapa kegiatan yang disesuaikan sebagai berikut:

1. Program Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penambahan pagu sebesar Rp 23.412.359 untuk melakukan pembelian printer dan scanner. Peralatan kantor dirasa sangat diperlukan mengingat beberapa aset printer dan scanner di kantor dinas sudah tidak layak pakai.

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Honorarium tenaga honorer yang disesuaikan dengan standarisasi 2020 sehingga menambah jumlah pagu. Honorer yang dipekerjakan di DPK berjumlah sembilan orang.

2. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

a. Penyediaan Bahan Bacaan Perpustakaan

Pengurangan pagu murni sebelum pegeseran mempengaruhi jumlah target pengadaan buku yang semula berjumlah 5.000 eks menjadi 4.334 eks. Pada kegiatan ini juga ditambahkan honorarium tim pokja, pphp dan tim teknis.

b. Pengembangan perpustakaan digital dan Bimbingan teknis perpustakaan berbasis IT

Kegiatan ini terpaksa ditangguhkan untuk dilaksanakan pada tahun depan disebabkan kegiatan tersebut memerlukan dana yang cukup besar dan tidak termasuk prioritas kegiatan. Pengembangan perpustakaan digital telah dilaksanakan tiga tahun mulai tahun 2017-2019 dan masih menyisakan target satu tahun sehingga dirasa layak untuk ditangguhkan sampai tahun depan. Sedangkan pada bimbingan teknis perpustakaan berbasis IT telah dicover oleh kegiatan lain yang bersifat pembinaan perpustakaan. Hal ini untuk meminimalisir berkumpulnya orang banyak yang sangat membahayakan pada saat sekarang ini.

### 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

#### a. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

Kegiatan ini akan disandingkan dengan kegiatan baru yang diusulkan pada renja perubahan. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan akan berjalan beriringan dengan kegiatan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif yang juga bersifat sosialisai dan penyuluhan. Selain itu, kegiatan tersebut tidan terdapat pada Renstra Dinas sehingga tidak mempengaruhi hasil akhir dari rencana strategis dinas.

Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengajukan 2 kegiatan baru pada renja dinas. Kegiatan tersebut adalah Pembangunan Gedung Kantor dan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip.

#### 1. Pembangunan Gedung Kantor

Pembangunan gedung layanan perpustakaan yang dilakukan pada tahun 2019 masih menyisakan sisa anggaran sebesar Rp 5.635.755.663 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sisa anggaran tersebut akibat adanya perpanjangan masa pembangunan gedung selama 90 hari kalender. Pembayaran selanjutnya direncanakan dilakukan pada anggaran perubahan ini. Untuk mendukung pemanfaatan dari gedung layanan tersebut maka perlu dilakukan dukungan dana yang bersumber dari APBD berupa sub kegiatan:

- a. Belanja Modal *Landscape* Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan (Jalan Menuju Gedung, Lahan Parkir, Drainase dan Pagar) sebesar Rp 4.216.452.000
- b. Belanja Modal Pengadaan Interior dan Meubelair Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan sebesar Rp 4.500.000.000

Sub kegiatan a dan b tersebut direncanakan akan dilakukannya berkerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara

## 2. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip

Kegiatan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip merupakan syarat agar mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebelum Gubernur Kalimantan Utara menetapkan Jadwal Retensi Arsip yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang ada dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kegiatan ini merupakan suatu urgensi setelah terbitnya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Kegiatan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip ini di fokuskan pada Jadwal Retensi Arsip Substantif yaitu Jadwal Retensi Arsip yang mengatur usia/masa simpan arsip dan nasib akhir arsip yang merupakan arsip pokok yang mencerminkan tugas dan fungsi utama instansi yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Rencana Kerja Anggaran Perubahan													
Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara													
Tahun Anggaran 2020													
SK : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan													
Su : Semua Sumber Dana													
DPAMURNI						DPA SETELAH PENYESUAIAN	USULAN PERUBAHAN						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Perubahan	+/-	Keterangan
Keperpustakaan													
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran (70 %)											
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah pelayanan surat keluar masuk	1000 Lembar	7,000,000	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah surat yang dikirim	500 Lembar	5,000,000	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	320,000,000	193,036,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah Pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	193,036,000	0	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah/unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	4 Unit	9,000,000	15,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah/unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	15,000,000	0	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor	Jumlah Pemakaian Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	849,600,000	831,416,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor	Jumlah Pemakaian Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	861,416,000	30,000,000	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Jasa Kebersihan Yang Digunakan	12 bulan	69,200,000	74,384,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah Jasa Kebersihan Yang Digunakan	12 bulan	74,338,409	-45,591	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Selor	Jumlah/jenis ATK yang disediakan	10 Jenis	149,252,426	150,968,426	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Selor	Jumlah/jenis ATK yang disediakan	10 Jenis	150,968,426	0	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah/jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Jenis	32,250,000	29,219,278	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah/jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	29,219,278	0	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	30,000,000	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	10,000,000	0	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah jenis peralatan kantor yang diadakan	10 Jenis	266,300,000	27,670,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah jenis peralatan kantor yang diadakan	6 Jenis	51,082,359	23,412,359	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	Jumlah/jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Jenis	4,000,000	4,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	Jumlah/jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Jenis	4,000,000	0	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor	Jumlah/porsi Makanan dan Minuman Untuk Rapat, Tamu, Kegiatan dan DLL	1640 Porsi	68,000,000	45,000,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor	Jumlah/porsi Makanan dan Minuman Untuk Rapat, Tamu, Kegiatan dan DLL	1086 Porsi	45,000,000	0	
12	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan	60 Kali	300,000,000	300,000,000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan	60 Kali	300,000,000	0	
13	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah yang dilakukan	80 Kali	330,000,000	330,000,000	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah yang dilakukan	80 Kali	337,044,668	7,044,668	

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur (70 %)											
14						Pembangunan Gedung Kantor	Tanjung Selor	- 3 Sub Kegiatan baru		3	3	Kegiatan Baru	
15	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Tanjung Selor	Jumlah unit yang disewa	1 Unit	80,000,000	160,000,000	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Tanjung Selor	Jumlah unit yang disewa	1 Unit	160,000,000	0	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Unit	125,000,000	140,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 Unit	140,000,000	0	
17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	10 Jenis	30,000,000	25,000,000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	10 Jenis	25,000,000	0	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (80 %)											
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	17 Orang	226,000,000	0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0 Orang	0	0	
Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan*		Jumlah kunjungan ke perpustakaan (1000 Orang/tahun)											
19	Penyediaan Bahan Bacaan Perpustakaan	Tanjung Selor	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	60000 Eksemplar	587,500,000	524,230,000	Penyediaan Bahan Bacaan Perpustakaan	Tanjung Selor	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia	4.334 Eksemplar	538,280,000	14,050,000	
20	Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara	Malinau	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara	80 Orang	229,400,000	86,100,000	Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara	Malinau	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan se-Kalimantan Utara	80 Orang	25,528,564	-60,571,436	
21	Pembinaan pada perpustakaan umum,khusus,sekolah dan perpustakaan masyarakat	Dalam Provinsi	Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan masyarakat yang dibina	8 Unit	332,700,000	95,000,000	Pembinaan pada perpustakaan umum,khusus,sekolah dan perpustakaan masyarakat	Dalam Provinsi	Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan masyarakat yang dibina	8 Unit	171,000,000	76,000,000	
22	Pengembangan perpustakaan digital	Tanjung Selor	Jumlah aplikasi perpustakaan dan kearsipan yang dikelola	1 Aplikasi	250,000,000	0	Pengembangan perpustakaan digital	Tanjung Selor	Jumlah aplikasi perpustakaan dan kearsipan yang dikelola	1 Aplikasi	0	0	
23	Bimbingan teknis perpustakaan berbasis IT	Tanjung Selor	Jumlah Perpustakaan yang Dibimbing	30 Perpustakaa n	172,400,000	0	Bimbingan teknis perpustakaan berbasis IT	Tanjung Selor	Jumlah Perpustakaan yang Dibimbing	30 Perpustakaa n	0	0	
Kearsipan													
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**		Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan (60 %)											
24	Penduplikatan dokumen/arsip daerah	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen Arsip yang diduplikasi	100 Dokumen/Ar sip	118,000,000	53,728,277	Penduplikatan dokumen/arsip daerah	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen Arsip yang diduplikasi	100 Dokumen/Ar sip	21,528,277	-32,200,000	
25						Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Tanjung Selor	Jumlah Dokumen JRA Subtantif yang diterbitkan	21 Dokumen	92,360,000	92,360,000	Kegiatan Baru	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan		Tingkat kepuasan pengguna informasi (60 %)											
26	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Tanjung Selor	Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	50 orang	163,150,000	43,550,000	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Tanjung Selor	Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	50 orang	0	-43,550,000	
27	Workshop perpustakaan dan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Tarakan	Jumlah Peserta Workshop Perpustakaan dan Kearsipan	40 Orang	345,250,000	164,476,000	Workshop perpustakaan dan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Tarakan	Jumlah Peserta Workshop Perpustakaan dan Kearsipan	40 Orang	57,976,000	-106,500,000	
Total Anggaran SKPD					5,094,002,426	3,307,777,981				3,307,777,984			

## BAB IV

### PENUTUP

Rancangan Perubahan Renja memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Triwulan II (dua) dan capaian Renstra DPK Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari masing masing program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPK Provinsi Kalimantan Utara. Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Namun demikian, tahap persiapan atau penyusunan anggaran harus di akui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus/proses anggaran daerah tersebut. Dengan berbagai sumber daya yang dimiliki, DPK Provinsi Kalimantan Utara dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja DPK Provinsi Kalimantan Utara diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan dan isu-isu dimasa mendatang dengan kebijakan kebijakan sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Renja DPK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 10 Juli 2020  
Kepala Dinas



**Dr. Ir. Hernawan, M.Si**  
NIP. 19630908 198902 1 002